BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Irak

Republik Irak dengan ibu kota Baghdad adalah sebuah negara Arab merdeka, yang terletak di ujung timur laut Teluk Arab. Luas wilayahnya mencapai 437.072 kilometer persegi. Irak berbatasan dengan Turki di sebelah utara, dengan Iran di sebelah timur, dengan Suriah dan Yordania di sebelah barat, dan dengan Arab Saudi dan Kuwait di sebelah selatan. Bisa dibilang, Irak tak punya laut, kecuali sebuah celah sempit di ujung tenggara, dekat Kuwait dan Iran. Dari tempat inilah, ekspor minyak Irak dikapalkan. Berlokasi di bagian timur dari wilayah Bulan Sabit Subur *(Fertile Crescent)* kawasan Irak ini secara historis dikenal sebagai Mesopotamia, yang artinya "tanah di antara dua sungai". Sebutan ini mengisyaratkan dua aspek fisik utama dari negeri tersebut, yakni lembah Sungai Tigris dan Eufrat. Wilayah Irak dapat dibagi menjadi tiga kawasan. Yakni, daerah pegunungan Kurdistan di utara kawasan tengah, antara Sungai Tigris dan Eufrat, yang sistem pertanian dan irigasinya sudah maju serta kawasan gersang dan gurun pasir di bagian barat dan barat daya. Cuaca di Irak umumnya kering dan sangat jarang turun hujan. Suhu udaranya sangat bervariasi. Pada musim panas, suhu udara bisa mencapai 34 derajat Celcius di bulan Juli. Pada musim dingin, suhu bisa turun sampai rata-rata 13 derajat Celcius. tahun di negeri ini

cuma 175 mm. Namun di daerah pegunungan sebelah utara, jumlah hujan yang turun jauh lebih banyak (Vaezi,2010:29-31).

3.1.1.1 Sejarah Irak

Dinasti Pertama Babylon, periode awal dunia Mesopotamia pun berakhir. Empat ratus tahun kemudian, adalah periode yang masih dalam misteri. Sampai kemudian, sebuah kelompok Indo-Eropa yang disebut orang Cassite trurun dari daerah dataran tinggi baratdaya Asia, dan menaklukkan dataran rendah, serta menjalankan pemerintahan mereka di Babylon dan di Assyria di utara. Dinasti Cassite dengan cepat mengadopsi banyak budaya dan institusi dari dinasti sebelumnya. Namun dinasti ini hanya meninggalkan sedikit catatan, dan bertahan sampai 1150 SM. Pada pertengahan pertama milenium terakhir sebelum Masehi, dua kota Babylon dan Nineveh telah menjulang maju, melebihi kota-kota lain di Mesopotamia. Tak lama sebelum periode ini, Dinasti Cassite digulingkan di Babylon dan digantikan oleh Dinasti Kedua Isin. Penguasa yang terpenting dari dinasti ini adalah Nebuchadnezzar (Mikati,2008:8).

Babylonia dan Assyria jatuh ke tangan Seleucis I, yang berkuasa dari 301 – 281 SM. Di bawah Dinasti Seleucis, pengaruh Helenistik masuk ke negeri ini. Pengaruh ini berlangsung terus di bawah orang Arsacid (atau Parthia), yang berkuasa dari 250 SM sampai 224 Sesudah Masehi. Selama periode ini, orang Parthia membangun kota Ctesiphon sebagai ibukotanya. Ctesiphon terletak tak jauh dari Baghdad,yang waktu itu belum dikenal. Selama dua abad kekuasaannya,

orang Parthia terus dikepung oleh Romawi. Kaisar Trajan Optimus menyerbu, dan pada tahun 110, untuk periode yang singkat, sempat menguasai wilayah yang sekarang menjadi Irak modern. Bagaimanapun, kekuasaan Romawi cuma bertahan satu dasawarsa. Wilayah Irak diperebutkan antara Parthia dan Romawi selama 400 tahun. Sampai Parthia kemudian ditaklukkan oleh orang Sassanid (Persia), dan Irak dimasukkan ke dalam Imperium Sassanid pada abad kedua. Selama empat abad kemudian, wilayah itu selalu menjadi bagian dari pergolakan politik dan religius yang kasar (Vaezi, 2010:30-35).

Pada tahun 637, Irak menerima masuknya Islam. Orang Arab dan kekuatan Islam menyapu, dari dataran rendah dan gurun ke tempat yang dinamai al-Qadisiyyah. Disinilah, kekuatan Arab menjejaki sisa-sisa Sassanid, mengejar raja mereka sampai sejauh Afganistan, di mana akhirnya ia terbunuh. Hanya dalam waktu empat tahun, orang Sassanid disingkirkan dari panggung sejarah.

Masuknya Islam di bawah imperium Arab menghidupkan kembali peradaban besar di Irak. Orang Arab lah yang pertama kali menyebut negeri ini "Irak". Berbagai khalifah silih berganti memimpin imperium ini, sampai tahun 750, ketika sebuah dinasti berdiri di Irak, yakni kekhalifahan Abbasiyah. Khalifah pertama dari dinasti ini, al-Saffah, memulai kekhalifahannya di Kufa. Ia kemudian memindahkan kekhalifahan ke sebuah kota yang diberi nama baru, Hashimiya, di mana ia wafat pada tahun 754. Putranya, al-Mansur, tiga tahun sesudah menjadi Khalifah, melakukan sebuah ekspedisi.Pada 758, al-Mansur menetapkan rencana pembangunan kota baru itu. Seratus ribu pekerja arsitek, insinyur, tukang kayu,

buruh, tukang gali, dan ahli-ahli lain dipanggil. Berdasarkan rencana al-Mansur, mereka membangun kota yang berbentuk bundar, dengan garis tengah hampir 2,4 kilometer. Ditengahnya ada alun-alun besar, yang berisi istana, disertai masjid. Jalan-jalan besar dibangun, dengan lebar lebih dari 8 meter. Selama berabad-abad, Baghdad menjadi pusat peradaban. Bukan hanya kemakmuran dunia terpusat di sini, tetapi juga sumber intelektualnya (Mahally,2003:11).

Saat itu kejayaan Roma telah ambruk. Roma menjadi kota yang dipenuhi rumput liar, dengan penduduk 50.000 petani, dan jalan-jalannya yang kosong hanya dilalui ternak. London dan Paris hanyalah desa biasa. Constantinopel, ibukota Byzantium, hanyalah kota kelas dua. Di satu-satunya imperium lain yang dikenal, Imperium Romawi Suci yang didirikan Charlemagne, bahkan orang terhormatnya sulit menulis namanya sendiri, dan tak ada yang lain. Di bawah dinasti Abbasiyah, setiap orang diharapkan menjadi terdidik. Universitas-universitas besar didirikan di Baghdad dan Nippur. Karya klasik Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab, dan kemudian diterjemahkan kembali ke bahassa Latin dan bahasa-bahasa Barat lainnya. Sains dan matematika berkembang. Tipografi angka Arab menjadi diterapkan secara universal, dan itu masih berlangsung sampai sekarang. Karya sastra pun maju pesat, dengan salah satu karya yang sangat terkenal, "Kisah Seribu Satu Malam." Selama 786 - 809, di bawah kekuasaan Khalifah kelima dan paling terkenal, Harun al-Rashid, Baghdad mencapai puncak kejayaannya (Mikati,2008:9).

Periode kekhalifahan Abbasiyah membawa masuk pengaruh Syiah, dan Baghdad tetap di bawah penguasa Syiah, sampai pertengahan abad ke-11. Dinasti Abbasiyah masih bertahan sampai 1258, ketika orang Mongol (Tartar) di bawah Hulagu Khan, cucu Gengis Khan, menyerbu dari timur. Mereka merebut kota dan membantai sampai sejuta orang. Di Baghdad, Hulagu dengan sengaja menghancurkan sisa-sisa dari proyek awal bangunan- bangunan kanal. Kekhalifahan Abbasiyah hancur oleh orang Mongol pada abad ke-13. Orang Turki kemudian mengusir orang Mongol dari wilayah itu, setelah perang sengit bertahun-tahun.

Dalam mendirikan Imperium Utsmaniyah di luar batas-batas Irak, para penakluk meninggalkan tanah yang sepi dan reruntuhan, yang sudah bersih dari sisa-sisa kemakmuran dan kejayaan yang dikumpulkan selama berabad-abad lalu. Daerah Bulan Sabit Subur itu telah merosot menjadi provinsi-provinsi yang tidak menarik, yang tergantung pada belas kasihan gubernur-gubernur Utsmaniyah. Irak terus menjadi bagian dari Imperium Utsmaniyah, dan hanya dengan sedikit perkembangan, sampai berakhirnya abad ke-19. Pada Perang Dunia I, yang pecah pada 1914, Turki bersekutu dengan Jerman dan Austria, dalam konflik global melawan Inggris dan Perancis. Tak lama sebelum itu, gerakan kemerdekaan Arab sebenarnya sudah memperoleh momentum. Para pemimpin Arab di berbagai bagian dunia Arab berjanji membantu Inggris, untuk melakukan revolusi melawan Utsmaniyah Turki. Janji ini muncul setelah Inggris setuju, untuk mengakui kemerdekaan Arab seusai perang nanti (Waterbury, 2001:21-24).

Imperium Utsmaniyah runtuh ketika pasukan Inggris menyerbu Mesopotamia pada 1917 dan menduduki Baghdad. Selama Perang Dunia I (1914-1918), Irak diduduki oleh pasukan Inggris, terutama di provinsi Basra dan Baghdad. Pada akhir perang, Inggris menduduki Mosul. Pada 1920, sebagai bagian dari perjanjian perdamaian seusai Perang Dunia I, negara Sekutu yang menang perang membagi wilayah provinsi-provinsi Arab bekas Imperium Utsmaniyah di antara mereka sendiri. Irak diduduki berdasarkan mandat dari Liga Bangsa-bangsa, dan administrasi pemerintahannya tetap dijalankan oleh Inggris. Liga Bangsa-bangsa sendiri merupakan organisasi internasional, yang dibentuk sesudah Perang Dunia I, berdasarkan ketentuan Perjanjian Versailles. Mandat ini adalah suatu bentuk pemerintahan tidak langsung, di mana para menteri dan pejabat Arab diawasi secara ketat oleh para penasihat Inggris, namun nasihat-nasihat itu harus dijalankan. Walau wilayah Irak ini pernah disatukan beberapa kali oleh sejumlah kekuatan luar di waktu-waktu lalu, Irak belum pernah menjadi satu negara yang merdeka. Tahun 1920 ini adalah cikal bakal pembentukan negara Irak modern (Hirsch, 2003:11).

Tahun 1921, Emir Faisal ibn Hussein dari dinasti Hasyim, Arab, dinobatkan oleh kekuatan Inggris menjadi Raja Irak. Inggris menciptakan basis sosial bagi monarki, dengan memformalkan kepemilikan penuh oleh pemimpin-pemimpin suku yang "layak" terhadap wilayah, yang sebelumnya secara adat adalah milik sukunya. Faisal adalah putra Sharif Hussain dari Makkah. Sedangkan saudaranya, Abdullah, diangkat menjadi Emir untuk wilayah tetangga

Transjordan, yang sekarang menjadi kerajaan Yordania. Oleh Inggris, Irak diperkenalkan pada konstitusi dan sistem parlemen dua kamar. Mandat Inggris berakhir tahun 1932, ketika Liga Bangsa-bangsa mengakui Irak sebagai negara merdeka. Namun Inggris masih mempertahankan kehadiran militernya di Irak, dan tetap memiliki pengaruh ekonomi dan politik yang kuat di sana. Inggris juga sudah mengamankan kontrak yang menguntungkan bagi eksplorasi dan eksploitasi minyak, yang diberikan kepada Iraq Petroleum Company, sebuah konglomerat yang menggabungkan kepentingan minyak Inggris, Belanda, Perancis, dan Amerika Serikat. Pada tahun 1941, sekelompok perwira Irak memimpin gerakan perlawanan yang berusia pendek melawan Inggris. Aksi ini diredam Inggris, yang berujung pada pendudukan Inggris yang kedua kalinya, sampai berakhirnya Perang Dunia II (Vaezi, 2010:21).

Pada Maret 1945, Irak menjadi anggota-pendiri Liga Arab, yang termasuk Mesir, Transjordan, Lebanon, Arab Saudi, Suriah dan Yaman. Pada Desember 1945, Irak menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Antara tahun 1941 dan 1958, pemerintahan di Irak dipegang secara bergantian sampai 24 kabinet. Sebagian besar kabinet itu merupakan kombinasi dari individu-individu dan elite yang sama, dan sering diketuai oleh politisi kawakan pro-Inggris, Nuri al-Said. Pada sebagian besar periode ini, partai-partai oposisi yang murni dilarang. Artinya, hanya sedikit peluang bagi pengembangan tradisi demokrasi. Banyak rakyat Irak percaya, kebutuhan yang paling mendesak bagi negeri itu adalah kemerdekaan nasional, yang disusul dengan pembangunan ekonomi dan reformasi

sosial. Namun justru hal-hal ini yang ditolak oleh monarki, dan Inggris yang menjadi sponsornya. Monarki Irak membuat beberapa blunder dalam kebijaksanaan luar negeri, pada 1950-an, yang akhirnya ikut memberi andil bagi kejatuhan monarki (Rubin, 2005:4).

Kesalahan besar dalam kebijaksanaan luar negeri itu terjadi tahun 1955, ketika Nuri al-Said mengumumkan, Irak bergabung dengan Pakta Baghdad yang disponsori Inggris. Pakta Baghdad, yang merupakan pakta pertahanan bersama Turki, Iran dan Pakistan ini merupakan tantangan langsung terhadap Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser. Sesudah Perang Dunia II, Irak memang dihadapkan pada pilihan, antara berpihak pada kekuatan Barat atau Uni Soviet. Pakta Baghdad, yang berarti mendukung Barat, membentuk garis pertahanan di selatan perbatasan Uni Soviet. Menanggapi manuver itu, Nasser melakukan kampanye media, yang menantang legitimasi monarki Irak, dan menyerukan kepada korps perwira militer untuk menggulingkan monarki.

Serangan gabungan Inggris-Perancis-Israel ke Sinai, Mesir, tahun 1956 semakin mengasingkan rezim Nuri al-Said dari barisan oposisi Irak yang terus tumbuh. Akhirnya, kudeta terjadi pada 14 Juli 1958. Raja Faisal II, Putra Mahkota Irak Abdillah, dan Perdana Menteri Nouri al-Said tewas dalam kudeta tersebut. Kudeta oleh para perwira Brigade ke-19 ini menempatkan Brigadir Abdul al-Karim Kassem sebagai Perdana Menteri, yang berkuasa atas Dewan Kedaulatan yang baru dibentuk. Pertarungan kekuasaan kemudian terjadi antara dua tokoh kudeta, Perdana Menteri Kassem dan Deputi Perdana Menteri, mantan Kolonel

Abdul as-Salam Muhammad Aref. Deputi Perdana Menteri dipecat, dan pada Maret 1959, Kassem mengumumkan mundurnya Irak dari Pakta Baghdad (Ricks,2006:26).

Sebuah kudeta militer pada Februari 1963, menjatuhkan pemerintahan Jenderal Kassem. Kudeta itu muncul dari aliansi antara para perwira militer nasionalis dan Partai Ba'ath (Partai untuk Pencerahan). Basis ideologi partai ini adalah sosialisme, nasionalisme Arab, dan sekularisme. Kolonel Aref menjadi Presiden di pemerintahan yang baru, dan kabinet baru pun dibentuk, dengan Brigadir Ahmad Hasan al-Bakr sebagai Perdana Menteri. Pada 17 Juli 1968, Jenderal Ahmad Hasan al-Bakr, yang waktu itu menjabat Perdana Menteri, menjadi Presiden melalui suatu kudeta tak berdarah. Kudeta ini menempatkan Partai Ba'ath di kekuasaan. Tanggal 17 Juli ini kemudian dijadikan Hari Kemerdekaan Irak. Saddam Hussein, yang berasal dari Partai Ba'ath, berkuasa di Irak menggantikan al-Bakr pada Juli 1979 (Vaezi, 2010:16-18).

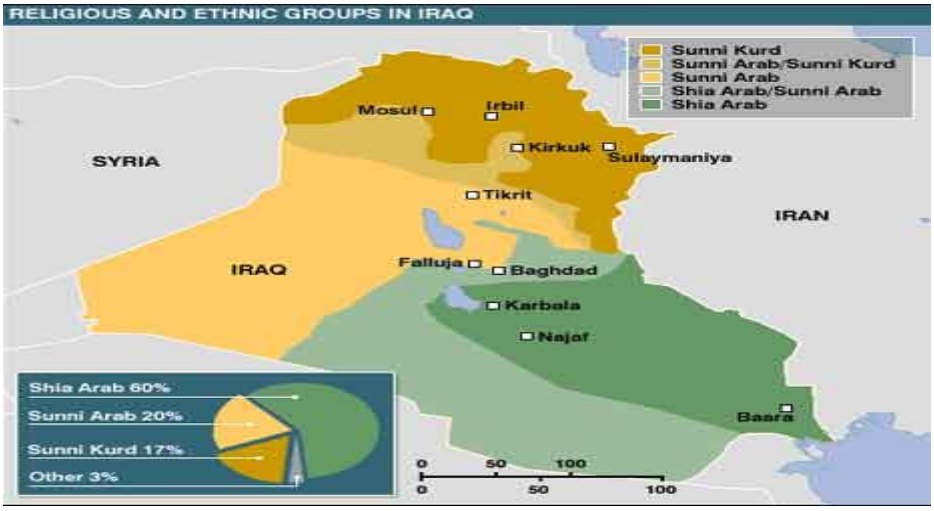
Presiden adalah Kepala Negara di Irak. Presiden menunjuk seorang Perdana Menteri yang menjadi Kepala Pemerintahan. Perdana Menteri memimpin sebuah Kabinet, yang dikenal sebagai Dewan Menteri. Sebagai Kepala Negara, Presiden juga bertindak sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, serta Ketua Dewan Komando Revolusi. Dewan komando ini terdiri dari delapan tokoh Partai Ba'ath terkemuka, termasuk Ketua dan Wakil Ketua, dan memiliki tugas menetapkan kebijaksanaan pemerintah. Sedangkan Dewan Menteri mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan tersebut, agar betul-betul dilaksanakan pemerintah.

Majelis Nasional adalah badan legislatif Irak, dan 250 anggotanya dipilih oleh rakyat. Tugas badan ini adalah membuat undang-undang, dari legislasi yang diberikan oleh keanggotaan di Majelis Nasional didominasi oleh Komando Regional Partai Ba'ath Irak.

Karena berbagai alasan, sebelum revolusi, tak ada satu pun partai demokratis liberal yang mampu menggalang semacam dukungan massal, ataupun membangun mesin partai yang efektif, di bawah mandat dan monarki (1920-1958). Merupakan suatu keanehan dalam politik Irak, bahwa gerakan kemerdekaan berfungsi hampir sepenuhnya di bawah tanah, dan banyak anggotanya berada di bawah pengaruh partai komunis, yang didirikan tahun 1934. Partai komunis mengorganisasikan hampir seluruh demonstrasi dan pemogokan massal tahun 1940-an dan awal 1950-an. Sesudah naiknya Gamal Abdul Nasser ke kekuasaan di Mesir pada 1952, kaum nasionalis pan-Arab dan Ba'athis juga mulai memperoleh pengaruh, terutama di kalangan populasi Sunni. Sebelum naiknya Nasser, sebagian karena faktor keragaman etnis dan komunal di Irak, pan-Arabisme gagal membuat banyak kemajuan, sementara nasionalisme Irak memiliki daya tarik yang jauh lebih besar. Bahkan pada akhir 1950-an, tak ada partai Nasseris yang cukup kuat di Irak. Sedangkan Partai Ba'ath, yang didirikan di Suriah, dibawa ke Baghdad oleh para guru sekolah Suriah di awal 1950-an. Partai ini hanya memiliki 300 anggota pada tahun 1955, tahun ketika Saddam Hussein bergabung dengan Partai Ba'ath (Vaezi,2010:35-38).

3.1.1.2 Penduduk, Agama, dan Etnis di Irak

Jumlah penduduk Irak keseluruhan sekitar 24 juta (perkiraan tahun 2003), di mana 74 persennya tinggal di perkotaan. Lebih dari 24 persen populasi tinggal di Kegubernuran Baghdad. Masyarakat Irak terdiri dari berbagai unsur, yang sebelumnya tak pernah digabungkan dalam satu negara merdeka. Dulu, dan juga sekarang, populasi Irak terbagi dalam berbagai kategori yang tumpang tindih, mencakup asal-usul sosial dan etnis, sekte religius, pekerjaan, latar belakang daerah dan kesukuan. Islam, yang dianut oleh mayoritas penduduk (95 persen), adalah agama resmi di Irak. Sekitar seperempat dari penganut Islam ini adalah dari etnis Kurdi, yang mayoritas beraliran Sunni. Sisanya yang tiga perempat adalah orang Arab. Komunitas agama lain adalah Kristen (3,6 persen), Sabaean dan Yazidi (1,4 persen). Bahasa Arab juga menjadi bahasa resmi Irak. Tetapi sesuai dengan keragaman etnis yang ada, bermacam bahasa digunakan di Irak. Seperti, bahasa Kurdi, Assyria, Persia, Turki dan Turkmen. Warga Arab Muslim di Irak sendiri terbagi dalam dua aliran: Sunni dan Syiah. Syiah adalah komunitas religius tunggal yang terbesar di negeri itu. Sensus Irak memang tidak memberi rincian afiliasi sektarian. Namun, karena Muslim Sunni dan Syiah tinggal di bagian-bagian wilayah yang berbeda di Irak (tidak termasuk Baghdad dan Basra, di mana dua komunitas Muslim itu bercampur), dimungkinkan untuk membuat semacam generalisasi (Waterburry, 2001:7).



Sumber :(http://janbtucker.com/blog/2014/06/20/iraqs-future-is-yugoslavia/ diakses pada 27 Maret 2015)

Gambar 3.1

Komposisi Penduduk dan Etnis di Irak

Komunitas Syiah merupakan 52 persen dari total populasi Muslim, dan yang lebih penting lagi, merupakan 70 persen dari populasi Muslim Arab di Irak. Wilayah selatan Irak didominasi penganut Syiah. Sementara di bagian tengah, barat, dan utara negeri itu sebagian besar adalah penganut Sunni. Tempat-tempat suci utama bagi penganut Syiah Dua Belas Imam yang merupakan agama negara di Republik Islam Iran, tetangga Irak terletak di wilayah Irak. Yakni, di kota Najaf, Karbala, Samarra, dan Kadhimain, salah satu distrik Baghdad. Tempat-tempat suci tersebut merupakan pusat utama untuk belajar agama, sekaligus merupakan kediaman tradisional bagi para pemimpin spiritual komunitas Syiah Dua Belas Imam, yang tersebar di seluruh dunia (Waterburry, 2001:8).

Karena Imperium Utsmaniyah pada dasarnya adalah institusi Sunni, fasilitas-fasilitas pendidikan negara yang ada di Irak sebagian besar adalah untuk penganut Sunni. dan sebagai konsekuensinya, warga Syiah tidak terdorong untuk masuk, dan tidak direkrut ke dalam, dinas-dinas pemerintahan. Lebih jauh, sebelum Perang Dunia I, sebagian besar warga Syiah terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat-pusat pemerintahan. Yakni, di kota-kota suci, yang keberadaannya cukup independen dari pusat. Maka, ketika negara baru dibentuk tahun 1920, sangat sedikit warga Syiah yang memasuki dinas pemerintahan. Situasi ini baru berubah dengan adanya perluasan pendidikan (sekuler) yang pesat pada tahun 1940-an, 1950-an dan 1960-an. Sebagai konsekuensi, akibat "keterlambatan start warga Syiah jadi kurang terwakili secara politik. Kecenderungan ini terus berlangsung, dan dikombinasikan dengan faktor-faktor lain. Seperti, negara yang semakin represif, yang memperkuat identitas komunal, sikap rezim yang eksklusif sejak 1968, serta terus merosotnya hubungan Irak dengan Iran. Dalam konteks terakhir ini, perlu dijelaskan bahwa walau warga Shiah Irak dan Iran berasal dari sekte yang sama, warga Syiah Irak lebih merasa dirinya sebagai orang Irak Arab (Waterburry, 2001:9).

Populasi di Irak juga terbagi dalam garis etnis, yakni terutama terdiri dari Arab 72% dan Kurdi 23%. Sedangkan sisanya, yang 5%, terdiri dari orang Turkman, Assyria, Armenia, dan kelompok-kelompok etnis lain yang lebih kecil. Komunitas Kurdi ini juga terdapat di Iran, Suriah, dan Turki. Etnis Kurdi

membentuk mayoritas populasi yang kompak di bagian utara dan baratlaut Irak. Sebagian besar warga Kurdi berasal dari suku-suku yang semi-nomaden.

Namun kendala-kendala di persimpangan perbatasan negeri, dan faktor-faktor ekonomi lain telah mendorong mereka untuk menetap. Sedangkan, penyediaan pendidikan yang lebih luas, perpindahan ke daerah perkotaan, dan berbagai perkembangan politik, cenderung mengurangi ikatan-ikatan kesukuan. Secara umum, pembagian-pembagian etnis dan sektarian menjadi kurang penting dalam dekade-dekade menjelang revolusi 1958. Sementara itu, gerakan kemerdekaan nasional bertindak sebagai faktor pemersatu yang krusial, dan membantu melampaui berbagai pembagian etnis dan sektarian di Irak saat ini (Sahal, 2006:7).

Selama dan sesudah Perang Dunia II, para anggota kelas menengah Irak yang sedang tumbuh memperluas investasinya di bidang manufaktur, perdagangan dan real estat. Proses ini dipercepat pada 1950-an, ketika minyak mulai memberi dampak besar pada ekonomi. Walau pendapatan dari minyak waktu itu masih kecil, pendapatan itu sudah memadai untuk membiayai perluasan birokrasi, sistem pendidikan dan pelayanan lain. Pembelanjaan pemerintah yang meningkat ini memberi dampak perangsang yang menyeluruh pada ekonomi. (Waterburry, 2001:12).

Modal swasta terus terkonsentrasi di tangan sejumlah 25 keluarga, yang banyak di antaranya telah mengontrol beberapa macam bisnis. Di antara mereka saja, keluarga-keluarga ini mengontrol lebih dari separuh dari seluruh perusahaan

swasta komersial dan kekayaan industri Irak. Jauh di bawah mereka, baik dalam status maupun kekayaan, terdapat pemilik properti kecil dan menengah, tokoh religius dan tokoh masyarakat lokal, pedagang eceran dan grosir, pemilik bengkel dan toko reparasi, pengolah, pedagang kecil, dan sebagainya. Termasuk juga di tingkatan bawah, terdapat kaum cendekiawan yang baru muncul, terdiri dari kalangan profesional, ahli hukum, perwira militer, dan pegawai negeri. Kelompok yang terakhir ini, bersama dengan bagian-bagian besar kaum miskin perkotaan, sangat menyadari sifat eksklusif dari sistem politik yang ada. Mereka menjadi inti dari gerakan kemerdekaan pada tahun 1940-an dan 1950-an. Permulaan dari sebuah kelas pekerja juga muncul, khususnya di perusahaan- perusahaan milik asing yang besar, seperti perusahaan kereta api, Pelabuhan Basra dan *Iraq Petroleum Company*. Karena hubungannya yang dekat dengan gerakan kemerdekaan, buruh yang terorganisasi ini berkembang menjadi kekuatan politik yang efektif, pada tahun-tahun menjelang revolusi (Hirsch, 2003:8-9).

3.1.1.3 Sistem Politik Irak

Irak menganut sistem Republik Parlementer dimana adanya pembagian kekuasaan berdasarkan Etnis, suku , dan aliran keagamaan di Irak seperti yang dianut oleh Lebanon. Di Irak kelompok syiah yang mayoritas mendapatkan kursi kekuasaan sebagai Perdana Menteri, Kelompok sunni mendapat kursi sebagai ketua Parlemen, sedangkan kelompok Kurdi mendapat kursi sebagai Presiden.

Pasca runtuhnya Rezim Saddam Hussein, umat Syiah Irak yang berjumlah lebih dari 60 persen penduduk tampil memainkan peran politik penting di negara ini. Partisipasi luas warga Muslim Syiah dalam pemilu beberapa tahun terakhir dan dukungan para ulama terkait pengokohan proses politik di Irak membuat potensi dan peran mereka di gelanggang politik dan sosial semakin besar. Faktor yang sangat dominan pada pembentukan aliansi baru menjelang pemilu legislatif di Irak adalah buah dari pemilu dewan provinsi pada awal tahun 2009 ini. Pemilu tersebut telah mempersiapkan kelahiran kubu dan aliansi baru khususnya di kubu Syiah. Kubu Sunni juga mengalami perubahan. Menurut para pengamat, kian menguatnya kelompok adat Sunni dan kian solidnya Dewan Kebangkitan yang dibentuk atas prakarsa AS untuk menghadapi Al-Qaeda berhasil menarik simpati warga di wilayah-wilayah Sunni. Di sisi lain terdapat upaya keras untuk menempatkan kembali Partai Baath ke pentas politik (Mikati,2008:23).

Pada Pemilu Irak, Koalisi Syiah pimpinan Perdana Menteri Nouri al Maliki berhasil merebut tujuh diantara 12 provinsi yang ada di Irak. Termasuk di pusat pemerintahan Baghdad. Pemilihan provinsi diselenggarakan akhir April, Koalisi Sunni, mengutip dari *BBC*, Pentas politik Irak dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini mengalami perubahan besar. Perubahan yang menonjol adalah kekuatan-kekuatan politik secara simbol mulai meninggalkan isu sektarian dan menggantinya dengan isu nasionalisme sebagai wadah pemersatu diantara warga Irak yang multi etnis yang didominasi warga syiah, sunni dan kelompok kurdi

(http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2010/03/100313_iraqelection.shtml diakses pada 18 April 2014).

Hal itu membawa dampak menjelmanya banyak koalisi politik yang di dalamnya beranggotakan berbagai macam latar belakang mazhab agama, etnis, ideologi, dan bahkan agama.Maka, kali ini muncullah nama kekuatan politik yang mengusung sentimen nasionalis, seperti Koalisi Nasional Irak, Koalisi Negara Hukum, dan Gerakan Nasional Irak. Hanya partai Kurdi yang masih mengibarkan bendera etnis, seperti Partai Demokrasi Kurdistan dan Uni Patriot Kurdistan, di mana para kandidat saat itu mencalonkan diri, berlomba, serta rakyat memberi suara atas dasar identitas mazhab agama, etnis, dan bahkan agama. Kekuatan-kekuatan politik menonjol dalam perpolitikan Irak adalah:

1. **Koalisi Nasional Irak**

   Koalisi Nasional Irak menghimpun 11 kekuatan politik. Di antara yang terpenting kekuatan politik utama Syiah, seperti Dewan Tinggi Islam atau SIIC pimpinan Ammar al-Hakim, kubu Al Sadr pimpinan tokoh muda Syiah Moqtada al-Sadr, Partai Fadilah, Parti Dakwah sayap Ibahim Jaafari, Kongres Nasional Irak pimpinan Ahmed Chalabi, kubu Al Wasat pimpinan Mouafik-Rubaie, dan sejumlah kekuatan politik Sunni, seperti Lembaga Ulama Muslimin dan Dewan Penyelamat Al Anbar, serta beberapa figur liberal, sekuler, dan independen. Koalisi Nasional Irak merupakan saingan terkuat Koalisi Negara Hukum pimpinan PM Nouri al-Maliki dalam pemilu legislatif kali ini.

2. **Koalisi Negara Hukum**

Koalisi Negara Hukum pimpinan PM Nouri al-Maliki menghimpun 50 kekuatan politik dan sejumlah figur politisi dari kalangan Sunni. Beberapa yang terpenting adalah Partai Dakwah sayap Nouri al-Maliki, Persatuan Islam Turkman pimpinan Abbas al-Bayati, kubu Independen pimpinan Hussein Shaharastani, serta beberapa figur Sunni, Kristen, dan Syiah

3. **Gerakan Nasional Irak**

Gerakan Nasional Irak menghimpun Gerakan Kerukunan Nasional pimpinan Iyad Allawi, Front Irak untuk Dialog Nasional pimpinan Saleh Mutlak, dan Perkumpulan Demokrat Independen pimpinan Adnan Pachachi.Gerakan Nasional Irak terakhir ini mendapat terpaan politik menyusul sejumlah tokohnya dilarang ikut pemilu oleh lembaga permasalahan dan keadilan karena dituduh memiliki hubungan dengan partai terlarang, Baath.Di antara tokoh yang dilarang ikut pemilu itu adalah Saleh Mutlak dan Dhafir al-Ani.

4. **Koalisi Persatuan Irak**

Koalisi Persatuan Irak menghimpun 26 kekuatan politik yang berlatar belakang islamis, sekuler, dan teknokrat. Diantara yang terpenting adalah Dewan Kebangkitan Irak pimpinan Ahmed Abu Rishah, Perhimpunan Republik Irak pimpinan Saad Asim al-Janabi, Ketua Dewan Waqaf Sunni Sheikh Ahmed Abdel Gafour Samarrai, Menteri Dalam Negeri Gawwad al-Bulani, dan mantan Menteri Pertahanan Saadon al-Dulaimi.

5. **Kubu Kurdi**

Terdapat empat kekuatan politik Kurdi di pentas politik Irak saat ini, yaitu Uni Patriot Kurdistan, Partai Demokrasi Kurditan, Uni Islami Kurdistan, dan Kubu Perubahan. Namun, yang menonjol adalah dua faksi politik klasik Kurdi, yaitu Partai Demokrat Kurdistan pimpinan Masoud Barzani dan Uni Patriot Kurdistan pimpinan Jalal Talabani yang kini menjabat Presiden Irak. Pada pemilu 2005 dan pemilu 2010 Partai Kurdi ini berkoalisi dengan nama Koalisi Kurdistan. Pemilihan provinsi kali ini adalah yang pertama sejak militer Amerika Serikat angkat kaki dari Irak. Menjelang dan saat pemilu, kekerasan meluas menyebabkan angka kematian korban melangit. Perpecahan pun meningkat antara Sunni dan Syiah. Alasannya, mayoritas Sunni Arab di Irak dipinggirkan Nouri al Maliki. Ratusan orang, baik warga sipil dan petugas keamanan meninggal. Serangan bom umumnya menimpa kawasan yang dihuni penduduk Syiah. Sebanyak 14 kandidat yang kebanyakan dari koalisi Sunni meninggal dunia. Bahkan serangan pun diarahkan ke tempat pemungutan suara (TPS). Pemerintah pun terpaksa menahan pemilihan di dua provinsi yang didominasi Sunni. menyatakan blok Nouri al Maliki memenangi pemilu Irak dan sebagai representasi kemenangan kubu syiah (http://internasional.kompas.com/read/2010/03/06/03331996/Pentas.Politik.pada.Pemilu.Irak.2006 diakses pada 19 Mei 2014).

3.1.1.3.1 Kondisi Politik Irak pasca Invasi Amerika Serikat (AS)

Amerika adalah kekuatan dominan pasca berakhirnya perang dingin dengan ditandai runtuhnya Uni Soviet. Kekuatan Amerika Serikat yang memang sangat besar terhadap seluruh aspek yang termuat dalam *Cow Index* (index militer, ekonomi, medis, teknologi, pendidikan dan lain sebagainya) membuat Amerika Serikat menjadi negara hegemoni. Semenjak menjadi negara adikuasa dan tak tersaingi oleh negara lain, Amerika Serikat seakan-akan bangkit menjadi negara adikuasa yang memegang peranan penting dalam setiap perumusan kebijakan-kebijakan internasional. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Amerika Serikat mempengaruhi setiap kebijakan internasional yang dibuat agar sesuai dengan kepentingan nasionalnya termasuk kebijakan AS di timur tengah.

Peristiwa 11 September 2001 yang ditandai dengan runtuhnya WTC (*World Trade Centre*) yang dilakukan oleh sekelompok teroris ini menjadi pukulan yang telak bagi Amerika Serikat, karena Amerika Serikat adalah negara yang menuntut perlindungan HAM dengan salah satunya mengecam aksi terorisme, namun justru menjadi korban dari aksi terorisme dan menghancurkan salah satu simbol hegemoni Amerika Serikat di dunia internasional. Posisi Amerika Serikat sebagai negara hegemon dan negara yang mengklaim dirinya sebagai penjamin keamanan internasional ini goyah dengan aksi terorisme. Oleh sebab itulah, kemudian Amerika Serikat menyerukan anti-terorisme dan menyatakan akan memberantas setiap aksi yang berhubungan dengan kegiatan terorisme di dunia. Dari penyelidikan yang dilakukan oleh aparat keamanan di

Amerika Serikat, didapatkan bukti-bukti bahwa kelompok yang bertanggung jawab terhadap pengeboman WTC adalah kelompok *Al-Qaeda*. Kelompok ini merupakan kelompok dengan anggota yang mayoritas merupakan penganut agama Islam dan tersebar di negara-negara dengan mayoritas Islam, dan salah satunya adalah Irak (Meisarah,2003:4).

Melalui pernyataan Presiden Amerika Serikat saat itu, George W Bush, Amerika Serikat menyatakan telah mengantongi bukti-bukti bahwa Irak merupakan salah satu negara yang menjadi basis terorisme di kawasan Timur Tengah dan memiliki senjata pemusnah massal yang bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB Selain itu, Amerika Serikat menuduh Irak merupakan negara yang otoriter yang berlaku sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Dan dengan rezim yang otoriter oleh Saddam Hussein ini dikatakan oleh pers barat dijuluki sebagai diktator paling bengis di Timur Tengah dan bahkan disebut-sebut sebagai Hittler jaman ini. Hal ini karena berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Saddam Hussein yang terang-terangan ingin menjadi negara yang terkuat, terbesar dan terhebat di kawasan Timur Tengah. Upaya tersebut diwujudkan dengan pengembangan militer yang gencar dilakukan oleh Irak untuk dapat menyaingi negara-negara disekitarnya. Dan hal tersebut membuat resah negara-negara tetangga Irak, termasuk Kuwait yang menjadi ladang minyak Amerika Serikat (Rubin,2005:6).

Sebagai negara yang menyatakan diri sebagai negara yang menjamin keamanan internasional, Amerika Serikat kemudian melakukan invasi terhadap

Irak pada tahun 2003. Walaupun ditentang oleh anggota NATO dan PBB, dengan berbekal kekuatan militer yang dimiliki, Amerika Serikat kemudian mengirimkan ribuan personil tentara dan perlengkapan militernya ke Irak, dengan satu tujuan yaitu menggulingkan rezim Saddam Hussein. Amerika Serikat menyatakan bahwa, selain merupakan upaya untuk menghapuskan terorisme di dunia, invasi yang dilakukan ke Irak ini juga merupakan upaya untuk mendemokrasikan Irak yang telah lama terbelenggu oleh rezim otoriter dan tidak mengenal adanya kebebasan.

Pasca invasi Amerika ke Irak ditandai dengan tumbangya rezim Saddam Hussein Irak mengalami destabilisasi ditandai dengan Perbedaan etnis dan madzhab yang plural memicu timbulnya konflik atau bahkan perang antar etnis yang muncul antar etnis dan golongan agama. Sebut saja konflik antara kelompok Syiah dan Sunni serta Kurdi, yang mana ketiga kelompok tersebut berlomba untuk memperebutkan kursi kekuasaan di Irak. Selain memperebutkan kekuasaan, kelompok Syi'ah yang merupakan mayoritas penduduk Irak dan telah terintimidasi sekian puluh tahun pada masa kepemimpinan Saddam Hussein, bangkit dan merasa harus balas dendam terhadap kelompok Sunni yang dianggap juga turut mendominasi mereka pada masa pemerintahan Saddam Hussein (Mikati,2008:9).

Hematnya, keruntuhan Saddam Hussein telah membawa Irak pada kondisi yang tidak stabil karena tidak adanya satu kekuatan besar yang bisa mengontrol sekte atau etnis yang ada di Irak sehingga masyarakat akan selalu cenderung

untuk memperebutkan kekuasaan. Kondisi seperti ini akan terus berlanjut sampai pemerintah Irak mampu untuk menjalankan fungsi kontrolnya. Hal diatas merupakan salah satu dari permasahan yang muncul setelah Amerika Serikat menginvasi dan meruntuhkan kediktatoran Saddam Hussein.

Pembunuhan demi pembunuhan dan serangan bom makin kerap terdengar dari negeri seribu satu malam itu. Konflik kekerasan di Irak terjadi baik di internal pemerintahan maupun antara pemerintah yang kini berkuasa dengan kelompok Al-Qaeda yang dicurigai mulai memainkan peran penting serta menancapkan pengaruhnya di Irak. Perdana Menteri Irak Nouri Al-Maliki mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Wakil Presiden Tariq al-Hashimi, atas tuduhan memerintahkan pengawalnya untuk melakukan pembunuhan terhadap para pejabat dan melakukan serangan bom mobil. Begitu rumitnya persoalan di dalam negeri Irak masih diperburuk dengan tetangga yang memiliki kepentingan agar Irak terus dalam keadaan tidak stabil. Menurut Rubin, semua negara tetangga Irak ingin agar Amerika Serikat menggantikan militer di Irak, tidak ada satu tetanggapun yang menginginkan Irak sukses atau demokratis. Pemerintah Turki yang mempunyai kepentingan agar jangan sampai kaum Kurdi Irak yang berada di dekat wilayahnya mendapatkan keuntungan, kemudian pemimpin Iran yang mencurigai munculnya kaum Syi'ah di Irak yang independen dan bebas dari kontrol mereka. Lalu negara berbasis Sunni lainnya yang khawatir bahwa Irak yang demokratis akan membawa pada dominasi Syi'ah di kawasan Timur Tengah (Rubin,2005:21)

Pada bulan Maret, tepatnya pada 2003, Irak melaksanakan pemilihan umumnya. Pemilihan umum tersebut adalah pemilihan umum yang kedua kali diselenggarakan oleh pemerintahan Irak pasca invasi Amerika Serikat (AS) ke Irak pada 2003. Pemilu yang pertama dilaksanakan pada tahun 2005 yang lalu. Pemilu legislatif yang digelar tersebut diikuti oleh 12 koalisai besar dan puluhan partai politik lainnya dan juga melalui jalur independen. Pemilu tersebut merupakan sebuah keran demokrasi yang telah berhasil ditanamkan oleh AS semenjak berhasil menjatuhkan rezim Saddam Hussein. Akan tetapi, pemilu tersebut menyisakan beberapa cerita mengenaskan. Hal ini terlihat dalam aksi-aksi peledakan bom yang terjadi pada saat pemilu tersebut berlangsung, pihak Al-Qaeda dalam hal ini langsung menyatakan bertanggung jawab terhadap serangan bom tersebut.Ironisnya berbagai macam gangguan keamanan tersebut justru terjadi setelah tumbangnya rezim Saddam Hussein yang banyak menilai bersifat otoriter dan juga keras. Keran demokratisasi di Irak yang pertama kali dibuka oleh AS pada tahun 2005 dengan mengadakan pemilihan umum pertama, ternyata juga tidak mampu meredam kekerasan demi kekerasan yang terjadi di Irak (Meisarah,2003:4-5)

3.1.1.3.2 Gerakan Politik Syiah Irak

Aktivitas kelompok Islam Syiah *(Shi'ite)* di Irak, khususnya di wilayah selatan, seperti Najaf dan Karbala meningkat pasca runtuhnya rezim Saddam

Hussein. Kelompok ini, terutama yang tergabung dalam Dewan Tertinggi Revolusi Islam Irak *(SAIRI, The Supreme Assembly of the Islamic Revolution in Iraq)* pimpinan Sayyid Muhammad Baqir al-Hakim, bahkan berniat membentuk pemerintahan semiteokratis ala Republik Islam Iran. Baqir al-Hakim memang merupakan pemimpin oposisi Irak yang berbasis di Teheran, Iran. Di Irak, umat Syiah merupakan mayoritas atau sekitar 57% dari sekitar 25 juta penduduk Irak saat ini. Pada umumnya terkonsentrasi di kawasan Irak selatan dan timur seperti, Basra, Karbala, Diwaniyah, Hillah, 'Amarah, Muntafiq, Kut, Najaf, Kazimain, dan al-Thaurah. Karbala (tempat syahidnya Imam Hussein bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW) dan Najaf sangat dikenal sebagai kota-kota suci umat Syiah Irak, sebagaimana kota Qom di Iran (Petterson, 2001:3).

Kendati mayoritas, umat Syiah di Irak baik dari segi politik maupun sosial-ekonomi berada dalam kondisi "tertinggal" dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Pada 1947 hanya satu dari dua orang Syiah Irak yang berpendidikan sekolah menengah. Beberapa tahun kemudian membaik. Rasionya sudah menjadi tiga berbanding lima. Antara 1920 dan 1958, tidak seorang Syiah pun yang mempunyai jabatan militer. Padahal pada periode yang sama terdapat 25 orang Arab Sunni dan 10 orang Kurdi yang mempunyai jabatan militer (Ricks, 2006:135).

Pada 1958, hanya 2 dari 15 jabatan tinggi militer yang dipegang orang Syiah. Memang, peran politik kaum Syiah masih lebih baik ketimbang peran mereka di bidang militer. Pada 1947, misalnya, untuk kali pertama seorang Syiah,

Salih Jabir, dipercaya membentuk kabinet, dan selama periode 1947-1958, 4 dari 8 Perdana Menteri Irak dipegang orang Syiah. Namun, setelah kudeta pertama Partai Ba'ath (1963), peranan politik dan militer kaum Syiah justru makin merosot. Pada periode November 1963-1970, komposisi dari 53 anggota Dewan Pimpinan Partai Bath adalah 84,9% Arab Sunni, 5,7% Syiah, dan 7,5% Kurdi. Padahal, pada periode 1952-1963 perbandingannya 38,5% Arab Sunni, 53,8% Syiah, dan 7,7% Kurdi. Setelah kudeta kedua Partai Bath (1968) sampai 1977, tidak seorang Syiah pun yang disertakan dalam Dewan Komando Revolusi (RCC), yang merupakan badan pembuat keputusan tertinggi di Irak era Saddam (Richards, 2001:7).

Di kalangan elite politik Irak, pada 1978-1991 hanya dua orang Syiah yang menjadi anggota RCC dan menduduki posisi cukup penting, yaitu Deputi PM Saadon Hamadi dan Menteri Pertahanan Tuma Abbas. Memang, sejak masa pemerintahan Ahmad Hasan Al-Bakr (1968-1979) dan Saddam Hussein (1979 - 2003), panggung politik Baghdad justru didominasi kelompok minoritas Arab Sunni, khususnya Partai Ba'ath, lebih khusus lagi keluarga Saddam dan "klan" al-Takriti. Dominasi kelompok minoritas Arab Sunni atau meminjam istilah Chibli Mallat (1988) "Sunnisasi" serta "Bathisasi" panggung politik Baghdad inilah yang menjadi sumber utama penentangan kaum Syiah terhadap rezim Saddam di Irak. Pemberontakan kaum Syiah yang pertama sejak kemerdekaan Irak terjadi pada 1935. Kala itu para ulama Syiah menuntut diajarkannya hukum Syiah pada sekolah-sekolah di seluruh Irak. Namun, gerakan Syiah baru terorganisasi pada

akhir 1950-an. Yaitu, ketika sejumlah ulama dan aktivis Syiah -seperti Muhammad Mahdi al-Asafi, Sayyid Kazim al-Ha'iri, Mahdi Ali Akbar Shariati (ketiganya keturunan Iran), Ali Muhammad al-Kurani, Mahdi al-Khalisi, dan Hamid Muhajir mendirikan Partai Dakwah Islam *(Hizb ad-Da'wah al-Islamiyyah)* di Najaf (Waterburry, 2001:11).

Pada 1979, di Baghdad lahir organisasi kaum Syiah yang lain, al-Mujahidin, yang didirikan antara lain oleh Sayyid Abdul Aziz al-Hakim, anak bungsu Ayatullah Muhsin al-Hakim (salah seorang ulama Syiah terkemuka di Irak). Berbeda dari Partai Dakwah yang menghendaki berdirinya rezim Islam Irak yang independen, al- Mujahidin secara tegas mengakui kepemimpinan Imam Khomeini (Pemimpin Iran, 1979-1989) dan dengan sendirinya, menginginkan rezim Islam Irak yang berorientasi ke Teheran. Namun, baik Dakwah maupun Mujahidin sama-sama mengakui kepemimpinan Imam Syiah Irak, Ayatullah Muhammad Baqir al-Sadr (Waterburry, 2001:14).

Baqir al-Sadr, yang oleh Hanna Batatu (1986) disebut sebagai *the most learned of Iraq's ayatullahs*, memang seorang ulama Syiah Irak yang sangat karismatis dan berwibawa, baik dilihat dari segi peranan politik maupun karya-karyanya. Dalam hal ini ia bisa disejajarkan dengan posisi Imam Khomeini bagi umat Syiah Iran, atau Imam Musa al-Sadr bagi umat Syiah Lebanon. Di antara karya-karya monumental al-Sadr yang sangat terkenal adalah Falsafatuna (*Falsafah Kita*, 1959), Iqtisaduna (*Ekonomi Kita*, 1960), dan al-Bank al-Laribawi fi al-Islam (*Bank Tanpa Bunga dalam Islam*, 1973) (Wijayanti,2006:23).

Menurut Al-Sadr, sebuah sistem yang dibangun di atas landasan falsafah, tradisi dan hukum Islam mampu memecahkan masalah-masalah sosial. Ia mengkritik secara tajam Marxisme dan kapitalisme yang mengeksploitasi kebebasan, dominasi golongan kaya atas mekanisme kekuasaan, dan alinasi individu dalam masyarakat yang dikendalikan sistem yang materialistis. Bagi Al-Sadr, Islam adalah alternatif yang paling paling tepat. Sebab, Islam mengajarkan bahwa Tuhan adalah sumber segala kekuasaan, legislator tunggal, dan satu-satunya pemilik semua sumber alam (Vaezi,2010:26).

Baqir al-Sadr sebenarnya baru "dinobatkan" sebagai *marji'* (ulama yang mempunyai otoritas di bidang hukum dan agama) bagi umat Syiah Irak setelah meninggalnya Muhsin al-Hakim pada 1970. Namun, di bawah kepemimpinan al-Sadr inilah kaum Syiah Irak mulai "diperhitungkan" sebagai sebuah kekuatan politik yang potensial. Bahkan ada yang menyebutkan al-Sadr sebagai pendiri *Jama'at al-'Ulama* yang menjadi cikal bakal Partai Dakwah, kendati hal ini dibantah antara lain oleh Baqir al-Hakim (anak Muhsin al-Hakim). Pada 1981, al-Hakim secara eksplisit menolak bahwa al-Sadr merupakan pendiri atau anggota Jama'at al-'Ulama. Menurut Baqir al-Hakim, al-Sadr bahkan tidak mempunyai kaitan baik dengan Jama'at maupun Partai Dakwah. Namun, terlepas dari kontroversi itu, sulit untuk memisahkan al-Sadr dengan gerakan kaum Syiah Irak, seperti diakui Baqir al-Hakim di kemudian hari. Pada masa al-Sadr, misalnya, para ulama Syiah di Najaf mulai menuntut peranan yang lebih aktif dalam kehidupan politik (Fiasco,2001:8).

Pada 1974 dan 1977, dalam prosesi memperingati hari Asyura (untuk mengenang kesyahidan Imam Hussein), kaum Syiah Irak melancarkan demonstrasi yang mengutuk para pemuka Ba'ath terutama Hasan al-Bakr dan Saddam Hussein. Ketika Revolusi Islam Iran berhasil meruntuhkan Dinasti Pahlevi, al-Sadr (pada Juni 1979) merencanakan memimpin sebuah *long march* dari Najaf ke Teheran untuk memberikan ucapan selamat pada Imam Khomeini. Namun, rezim Ba'ath yang tidak menghendaki terlaksananya rencana itu, segera menangkap al-Sadr. Tindakan penguasa ini justru membangkitkan kerusuhan anti-Saddam yang lebih luas di kalangan umat Syiah Irak.

Selama hampir setahun berada dalam tahanan rumah, al-Sadr dan seorang saudara perempuannya (Amina binti al-Huda) kemudian dieksekusi pada 8 April 1980. Besoknya, puluhan aktivis Partai Dakwah juga dijatuhi hukuman mati. Penumpasan yang dilakukan rezim Saddam terhadap gerakan kaum Syiah menyebabkan terjadinya eksodus (200.000 - 350.000) warga Syiah Irak ke Iran. Di samping ke Iran, sejumlah aktivis Partai Dakwah lain menyelamatkan diri ke Inggris, Lebanon, dan Suriah. Hubungan Iran-Irak pun semakin meruncing dan mencapai klimaks dengan berkobarnya Perang Iran-Irak (September 1980 - Agustus 1988).

Meninggalnya al-Sadr dan aksi represif rezim Saddam mengakibatkan gerakan kaum Syiah Irak mengalami masa-masa paling sulit. Masalah suksesi segera muncul ke permukaan, sementara perpecahan pun tak bisa dihindarkan. Oleh sebagian ulama Syiah, dua organisasi yang ada: Partai Dakwah dan al-

Mujahidin, dianggap tidak lagi representatif. Mereka mencoba mendirikan organisasi baru seperti Organisasi Aksi Islam, Dewan Ulama untuk Revolusi Islam Irak, Tentara Revolusioner untuk Pembebasan Irak, Kelompok Ulama Pejuang Irak, dan Biro Revolusi Islam Irak. Namun, kecuali Organisasi Aksi Islam (*Munazzamat al-'Amal al-Islami*), kelompok-kelompok baru tersebut tidak mampu bertahan lama (Meisarah,2003:12).

Jadi sampai menjelang 1982, di Irak ada tiga organisasi kaum Syiah: Aksi Islam, Partai Dakwah, dan al-Mujahidin. Pada 17 November 1982, para aktivis Syiah di Irak sepakat membentuk Dewan Tertinggi Revolusi Islam Irak atau *The Supreme Assembly of the Islamic Revolution in Iraq (SAIRI)* di bawah kepemimpinan Sayyid Muhammad Baqir al-Hakim. Sejak saat itu pula, al-Hakim, dengan "restu" Teheran, diakui sebagai pemimpin utama gerakan Syiah Irak. Namun, al-Hakim belum bisa disejajarkan dengan al-Sadr. Tidak satu pun, misalnya, karya al-Hakim yang mampu menandingi Iqtisaduna dan Falsafatuna atau karya-karya al-Sadr lain. Juga, yang sulit dibantah, berbeda dari al-Sadr yang "tumbuh sendiri", Baqir al-Hakim tampak selalu berada di bawah bayang-bayang kebesaran nama ayahnya, Ayatullah Muhsin al-Hakim. Hingga kini Baqir al-Hakim belum sepenuhnya mampu menyatukan organisasi-organisasi kaum Syiah Irak yang lain ke dalam SAIRI (Mikati,2008:15).

3.1.1.4 Politik Luar Negeri Irak

10 tahun terakhir, Irak telah mengalami dramatis, cepat, dan positif transformasi dan membuat kemajuan setelah puluhan tahun perang dan ketidakstabilan yang ditimbulkan oleh Saddam Hussein. Hari ini, Republik Irak mengembalikan peran alam sebagai mitra global kritis dan kekuatan stabilisasi di Timur Tengah. Irak bisa menjadi faktor positif bagi stabilitas regional dan, negara yang damai ramah yang menghormati kepentingan nasional dan memahami masalah keamanan dari tetangga kita. Prioritas dan tujuan dari Kementerian Luar Negeri meliputi:

1. Melindungi keamanan Irak, menstabilkan negara dan menjaga keutuhan wilayah Irak.
2. Memulihkan hubungan bilateral internasional diplomatik dan re-melibatkan masyarakat internasional dalam rekonstruksi dan pembangunan Irak.
3. Merekonstruksi ekonomi dan infrastruktur untuk meningkatkan standar hidup rakyat Irak.
4. Mengaktifkan misi diplomatik Irak dan mempromosikan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya Irak.
5. Bergabung kembali, dan terlibat dalam badan multilateral.
6. Mereformasi Departemen Luar Negeri dan kegiatannya didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip baru.

7. Mengejar jalan yang kita pilih demokratisasi dalam kerangka kedaulatan, kesatuan dan kewarganegaraan yang sama.

Departemen Luar Negeri Irak secara aktif mengejar normalisasi hubungan diplomatik dengan masyarakat internasional atas dasar kerjasama dan menghormati kepentingan bersama dan hukum internasional dan mempromosikan dan melindungi kepentingan Irak melalui partisipasi aktif dalam forum multilateral dan inisiatif. Irak baru berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, demokrasi dan tata pemerintahan yang baik, dan kami menolak proliferasi ilegal Senjata Pemusnah Massal.

Di wilayah Timur Tengah, prioritas Irak adalah untuk membangun kembali dan meningkatkan hubungan bilateral Irak melalui kebijakan luar negeri aktif dan transparan, memperkuat hubungan dengan negara-negara Arab dan memperbaiki hubungan dengan masyarakat Islam yang lebih luas. Irak menjangkau negara tetangga dan negara-negara Arab melalui partisipasi dalam forum multilateral, termasuk Liga Arab, dan dengan mendorong kerjasama regional berdasarkan ikatan budaya sejarah dan kedekatan geografis. Irak tetap berkomitmen untuk identitas Islam dan sebagai rumah bagi beberapa situs suci Islam, Irak juga tujuan wisata religi kaum syiah dan mempromosikan perdamaian kawasan (http://www.iraqiembassy.us/page/foreign-policy diakses pada 24 Desember 2014)

3.1.1.5 Kebijakan Luar Negeri Irak

Selain Arab Saudi dan Iran yang hadir sebagai kekuatan minyak terkuat di dunia dan Timur Tengah, Irak muncul dengan kekuatan minyaknya setelah Arab Saudi dan Iran. Sebagai negara yang independen sejak tahun 1921, Irak adalah salah satu negara penting di kawasan Teluk Persia dan juga berperan signifikan terkait stabilitas dan keamanan kawasan Timur Tengah. Semenjak kemerdekaannya, Irak menunjukkan sikap berbeda yang signifikan dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Hal ini dapat terlihat pada tahun 1921-1958, dimana Irak menunjukkan sikap yang kooperatif di bawah sistem Monarki. Pada periode ini, Irak memiliki kedekatan erat dengan Iran dan Arab Saudi melalui ikatan rezim monarki tradisional dan berkolaborasi regional yang berorientasikan pro-Barat.

Lalu perubahan Irak terjadi pada rentan tahun 1958-2003 pasca runtuhnya rezim monarki dan Irak berubah menjadi sebuah negara Republik kebijakan luar negeri Irak mengalami perubahan yang signifikan dibawah rezim ba'ath yang dipimpin oleh Saddam Hussein Sejak rezim ba'athist menduduki roda pemerintahan tahun 1968, mengantarkan Irak pada konsolidasi kekuatan, sentralisasi partai politik, pandangan *pan-Arabisme.* Kebijakan luar negeri Irak pada tahun 1980an dan dua fenomena perang desktruktif penting antara Irak-Iran dan Irak-Kuwait. Saddam Hussein menghendaki perwujudan supremasi di Teluk Persia dan mengklaim kepemimpinan atas dunia Arab. Invasi Irak ke Iran tahun 1980, mengantarkan hubungan keduanya pada konflik dan instabilitas regional

selama delapan tahun. Sifat destruktif Saddam Hussein kembali terulang pada tahun 1990 ketika Irak mulai menginvasi Kuwait (Vaezi, 2010: 27-28).

Pasca Tumbangnya pemerintahan Saddam Hussein dan terpilihnya Nouri al Maliki sebagai Perdana Menteri Irak, kebijakan luar negeri Irak mengalami perubahan diantaranya membaiknya hubungan luar negeri terhadap Iran. Maliki juga dihadapkan pada situasi politik Timur Tengah yang tidak stabil diantaranya peristiwa Arab Spring (konflik Suriah). Dalam konflik Suriah Maliki bersama sama dengan Iran dianggap mendukung pemerintahan Bashar al-Assad dalam memerangi oposisi berlawanan dengan mayoritas negara Arab lain yang mendukung oposisi Suriah. Maliki juga dihadapkan pada kemelut politik dalam negeri Irak diantaranya meningkatnya isu sekterian, ancaman terorisme juga ikut berpengaruh dalam penentu kebijakan luar negeri Irak. Dukungan Arab Saudi dan perlindungan Turki atas mantan Wakil Presiden Irak Tariq Hashemi yang divonis Mati dalam pengadilan *in Absentia* jelas mengganggu hubungan Irak dengan kedua negara tersebut. Maliki juga menjalin hubungan yang kuat dengan Amerika sebagai penjamin keamanan Irak dan peran Amerika dalam pembangunan kembali militer dan ekonomi Irak.

Maliki juga memperluas hubungannya dengan Rusia kontrak militer lebih dari 4 miliar dolar antara Rusia dan Irak sebagai pembelian senjata terbesar selama 6 tahun terakhir bagi Moskow. Irak juga memiliki kesamaan sikap dengan Rusia dalam memandang konflik Suriah. Maliki juga memandang pentingnya China bagi Irak, dalam hal kepentingan China dengan sumber daya energi. Irak

menganggap China memiliki modal yang sangat dibutuhkan Irak untuk membangun infrastruktur minyak dan gas Irak pasca perang (http://www.iraqiembassy.us/page/foreign-policy diakses pada 24 desember 2014)

3.1.1.6 Hubungan Luar Negeri Irak Iran pada masa Maliki

Irak yang berbatasan langsung dengan Iran memiliki kedekatan secara historis dengan Iran, karena memiliki kesamaan sebagai negara mayoritas beraliran Syiah diantara negara mayoritas Sunni di Timur Tengah. Aksi penyerangan militer Amerika Serikat terhadap Irak telah merubah struktur politik di Irak. Struktur pemerintahan Irak yang sebelumnya didominasi oleh kelompok muslim Sunni berubah pasca invasi AS menjadikan kelompok muslim Syiah yang mendominasi pemerintahan. Irak dibawah pemerintahan Maliki yang bermazhab Syiah memiliki kedekatan historis dengan Iran dimana pada era Saddam Hussein Iran dijadikan basis Maliki untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Saddam Hussein. Presiden Irak Jalal Talabani walaupun berasal dari etnis Kurdi namun fasih berbahasa Persia (Rubin,2005:6)

Kuatnya pengaruh kelompok Syiah di Irak dapat dilihat dari arah kebijakan Irak. Pemerintah Irak diketahui sebagai pendukung setia pemerintah Iran. Irak berkali-kali menolak Sanksi Internasional terhadap Iran karena program nuklir kontroversial Iran. Dukungan itu terlihat saat pemerintah Irak mengizinkan penerbangan dari Iran melewati wilayah udaranya menuju Suriah. Padahal, Amerika Serikat tidak menginginkan hal itu. Arah kebijakan yang condong ke

kelompok Syiah itu juga terlihat dari dukungan Baghdad kepada rezim Assad di Suriah. Baghdad berpihak pada pemerintah Suriah yang menentang Amerika, kata Heydemann, analis *US Institute of Peace.* Irak juga menutup kamp konsentrasi *Mujahidin Khalq (MKO)* kelompok teroris asal Iran yang kerap melakukan tindakan teror di Iran yaang bermarkas di Irak dimana kelompok teror ini mendapat perlindungan di era pemerintahan Saddam Hussein.

Pemimpin kedua negara juga rutin mengadakan pertemuan untuk memperluas kerjasama kedua negara. Para pemimpin Irak kerap Menjadikan Iran sebagai negara pertama dalam kunjungannya ke luar negeri. Irak juga menjawab kekhawatiran Iran atas markas pasukan AS yang berada di Irak dan menjamin Iran bahwa tidak ada negara manapun yang diperbolehkan melakukan serangan ke Iran dari wilayah Irak. Maliki menjamin persetujuan mengenai kedudukan penempatan tentara yang akan ditandatangani Irak dan AS tidak akan merusak kepentingan Iran. Irak dan Iran juga telah menandatangani memorantum pengertian yang bertujuan meningkatkan kerja sama militer antara kedua negara. Menteri pertahanan kedua negara menyatakan keinginan meningkatkan kerja sama militer bilateral, dan berpendapat memperkukuh dan mengembangkan hubungan kerja sama militer antara kedua negara akan menguntungkan perdamaian dan stabilitas regional. Irak sebagai negara tetangga Iran, memiliki banyak persamaan. Pasca agresi militer Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003, Iran telah berperan besar dalam rekonstruksi di Irak. Volume perdagangan antara Iran dan Irak di berbagai sektor mencapai 15 miliar dolar pada tahun 2014 (Kuncahyono,2005:2)

3.1.2 Iran

3.1.2.1 Sejarah Iran

Iran atau persia berasal dari Ras Arya yang merupakan salah satu ras Indo-Eropa. Migrasi bangsa Arya ke berbagai belahan bumi seperti ke Iran dan India dimulai pada 2.500 Sebelum Masehi (SM). Peradaban di dataran tinggi Iran dimulai 600 tahun SM di mana saat itu terdapat 2 kerajaan yakni Parsi di sebelah Selatan dan Media di Timur Laut Iran. Dinasti Parthian, Pada tahun 550 SM, Cyrus the Great berhasil merebut 2 kerajaan Persia tersebut, namun tidak berhasil memperpanjang kekuasaannya. Pada 521 SM Raja Darius mendirikan Dinasti Achaemenid hingga Darius III. Pada 323 SM, Alexander the Great berhasil menaklukan Dinasti Achaemenid. Di masa Dinasti Parthian (Raja Mirthridates II) berhasil menjalin hubungan dengan Tiongkok dan Romawi yang dikenal dengan perdagangan sutranya *(Silk Road).* Pada 220 SM, Dinasti Sassanid mengakhiri kejayaan Setelah peperangan selama 4 abad, seiring memudarnya Kerajaan Romawi, Kerajaan Persia yang menganut zoroaster hancur dan diinvasi oleh Kerajaan Mesir dan Arab lainnya dan berhasil menyebarkan agama Islam ditanah persia. Dari abad 7 hingga abad 16 Masehi, berbagai Dinasti keturunan Arab, Turki dan Mongol saling berkuasa yakni Dinasti Abbasid, Dinasti Saffarian, Dinasti Sasanid (Abud,2015:2)

Pada abad ke 16 khususnya pada masa Kerajaan Savafid, tercapai masa kejayaan dalam bidang kerajinan dan pembuatan karpet. Pada abad 17 Dinasti Afshar berkuasa, namun kemudian digantikan oleh Karim Khan Zand yang

mendirikan Dinasti Zand di Selatan. Di sebelah Utara Suku Qajar berhasil mematahkan Dinasti Zand dan mendirikan Dinasti Qajar hingga abad 19 dengan Rajanya yang terakhir bernama Ahmad Shah.

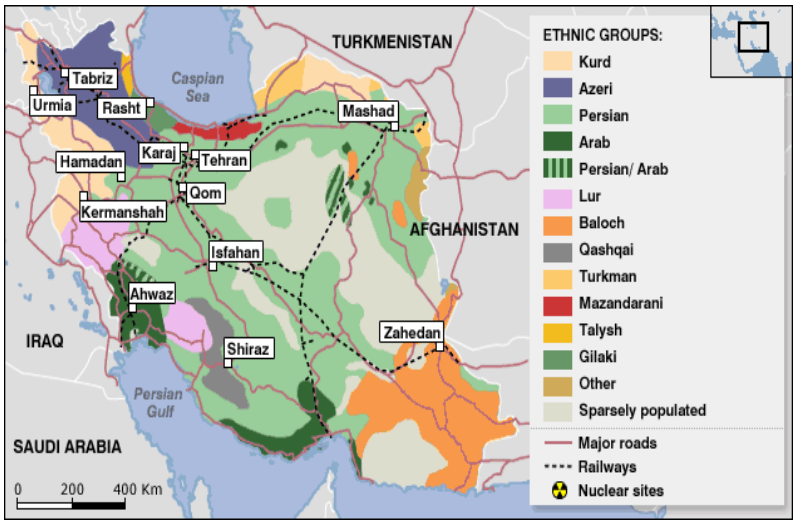
Pada tahun 1921, terjadi kudeta militer yang dipimpin oleh Reza Shah Pahlevi yang kemudian menjatuhkan Ahmad Shah dan mengangkat dirinya sebagai Raja Iran. Pada 1941, anaknya bernama Mohammad Reza Shah naik tahta hingga terjadi Revolusi Islam yang dipimpin oleh Ayatollah Imam Khomeini pada 1979. Berbagai peristiwa menonjol sejak itu adalah pendudukan Kedubes Amerika Serikat (1979-1981) Invasi Irak terhadap Iran pada 1980 yang menimbulkan perang selama 8 tahun (1980-1988) dan sanksi ekonomi (energi) Amerika sejak 1996.

3.1.2.2 Penduduk, Agama, dan Etnis

Jumlah penduduk Iran mencapai 70,3 juta jiwa. Berdasarkan sensus bulan juni tahun 2000 penduduk Iran terbagi dalam kelompok Rasial. Mereka adalah Persia 51%, Azeri 24%, Gilaki dan Mazandarani 8%, Kurdi 7%, Arab 3%, Baluchi 2%, Lor 2 %, Turkmen 2% dan Yahudi 2%.

Disamping keragaman agama dan sekte yang tersebar di Iran adalah Syiah 91%, Sunni 7,8 %, dan kaum yahudi, kristen, baha'i dan zoroaster secara keseluruhan mencapai 10%. Implikasi ini menunjukkan meskipun Iran terdapat beragam agama dan sekte menunjukkan aliran islam syiah sebagai mayoritas yang

menjalankan roda pemerintahan. Dengan demikian Iran adalah negara syiah pertama di seluruh dunia (Abud,2015:1-3).



Sumber : http://www.payvand.com/news/08/mar/1294.html diakses pada 12 Maret 2015).

Gambar 3.2

Komposisi Penduduk, dan Etnis di Iran

Umat islam sunni di Iran mencapai 7% dari seluruh penduduk Iran. Mereka terbagi kedalam 3 etnis yaitu Kurdi, Baluchi, Turkmen,dan minoritas Arab di wilayah Ahwaz. Mereka mendiami wilayah yang memiliki garis perbatasan yang memisahkan Iran dengan tetangga nya yang mayoritas bermazhab sunni diantaranya Pakistan, Afganistan, dan Turkmenistan. Pada awalnya Iran adalah negara bermazhab sunni hingga abad ke sepuluh hijriyah dan berubah menjadi Syiah sejak dinasti Safavid berkuasa di Iran (Hendayana,2010:9).

Jika kita membaca geopolitik dan kependudukan Iran yang rumit maka akan nampak bahwa Iran terbentuk dari heterogenitas etnik yang melingkupi dataran tinggi persia yang memiliki alam dan beriklim ekstrem. Bahwa kaum minoritas Iran memiliki keterkaitan dengan negara tetangga Iran. Dataran tinggi Persia terisolasi dalam pertengahan etnik yang beragam. Misalnya dari arah barat dan barat daya Iran dikelilingi oleh etnis Ahwaz Arab yang memisahkannya dari pesisir Arab dan Teluk Persia hingga Selat Hormuz. Dari arah barat dan barat daya dikelilingi provinsi Kurdistan yang berkaitan erat dengan wilayah Kurdistan di Irak dan Turki. Adapun wilayah orang-orang Azeri, mereka berada di utara yang menyempurnakan negara Azerbaijan dimana jumlah penduduknya mencapai 5,7 juta jiwa, sedangkan pada saat yang sama jumlah penduduk di provinsi Azerbaijan timur di Iran mencapai 20 juta jiwa. Sedangkan di Timur laut, maka etnis Turkmen memisahkan Iran dari negara Turkmenistan. Disebelah timur dan tenggara maka etnis Baluchistan memisahkan dataran tinggi Iran dari laut Arab, teluk Oman dan Pakistan. Sedangkan etnis Yahudi banyak mendiami beberapa wilayah kota di Iran seperi Teheran, Esfahan, Qazvin, dan Yazd. Etnis suku dan aliran agama yang beragam di Iran mendapat kursi di parlemen Iran (Abud,2015:6).

3.1.2.3 Sistem Politik Iran

Agama resmi Negara adalah Islam beraliran Ja'fari (Syiah Imam ke 12). Aliran Islam lainnya yang bermadzhab Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki serta

Syiah Zaidiyah diakui dan pelaksanaan syariat-syariatnya dilindungi oleh UU Iran. Sistem pemerintahan Iran menganut konsep Wilayatul Faqih yang diusung oleh Ayatullah Rohullah Khomeini dianggap sinkronisasi antara sistem demokrasi dan Sistem Pemerintahan Islam Syiah. Dalam hal ini rakyat Iran memilih dewan pakar berjumlah 8 orang , dan dewan pakar inilah yang kemudian memilih rahbar atau wali faqih pemimpin tertinggi Iran. Landasan konsep Wilayatul Faqih ini adalah *prinsip al-wilayah al-ilahiyyah al-ammah* atau otoritas umum Tuhan, *wilayatun-Nabi* atau otoritas Nabi, dan *wilayah al-aimmah* atau otoritas para imam. Kelompok Islam Syiah meyakini adanya wewenang para ulama dalam membentuk pemerintahan sebelum munculnya Imam mahdi imam ke 12 dalam Mazhab Syiah.

Hukum tertinggi konstitusi Republik Islam Iran disahkan pertama kali oleh majelis ahli pada 15 November 1979 dan di Amandemen pada juli 1989. Kepala pemerintahan dijabat seorang Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 4 tahun, dapat dapat dipilih kembali maksimal satu kali. Presiden dibantu oleh 9 orang wakil presiden yang membidangi tugas masing-masing serta 21 menteri anggota kabinet. Sistem pemerintahan Iran menganut sistem presidensiil dan parlementer, di mana anggota kabinet ditunjuk/diangkat oleh Presiden tetapi harus mendapat persetujuan dari Majelis serta bertanggun gjawab kepada Presiden dan Majelis. Presiden harus bertanggung jawab kepada rakyat, Leader dan Parlemen (Majelis), Iran terbagi menjadi28 Propinsi dan 114 tingkat kabupaten. Setiap Propinsi dipimpin seorang Gubernur Jenderal

sedangkan kabupaten/kotamadya dipimpin Gubernur. Sejak terbentuknya Islamic Council tingkat Daerah (DPRD) hasil Pemilu Februari 1999 pengangkatan para Gubernur Jenderal dan Gubernur dilakukan oleh DPRD (Hirsch,2003:7)

Parlemen Iran (Majelis-e Syura-e Islami) merupakan lembaga legislatif yang beranggotakan 290 orang. Anggota Majelis dipilih melalui Pemilu setiap 4 tahun sekali dengan sistem distrik. Setiap 10 tahun rasio anggota Majelis ditinjau kembali sesuai dengan jumlah penduduk.

Kekuasaan tertinggi lembaga peradilan Iran dijabat oleh Ketua Justisi yang diangkat langsung oleh Leader atau wali faqih untuk masa jabatan 5 tahun. Ia haruslah seorang Ulama Ahli Fiqih (Mujtahid). Sistem peradilan Iran mempunyai dua bentuk yaitu peradilan umum dan khusus. Peradilan umum meliputi Pengadilan Tinggi Pidana, Pengadilan Rendah Pidana, Pengadilan Tinggi Perdata, Pengadilan Rendah Perdata dan Pengadilan Perdata Khusus. Sedangkan Pengadilan Khusus terdiri dari Pengadilan Revolusi Islam, Pengadilan Khusus Ulama dan Pengadilan Pers. Selain itu terdapat berbagai lembaga tertingi lain diantaranya Dewan pengawas konstitusi yang bertugas sebagai penafsir konstitusi, Dewan kebijaksanaan nasional yang bertugas sebagai pengawas pembangunan, RAPBN, dan Dewan Keamanan Nasional (Hirsch,2003:6-7)

3.1.2.4 Politik Luar Negeri Iran

Strategi Politik Luar Negeri Iran dalam menggapai tujuan diantaranya adalah menghegemoni Dunia Islam *(Al-amal fi ithari Al-Islam.* Hal ini berarti

pentingnya mendayagunakan umat dengan seluruh kemampuannya demi kehidupan dan pertumbuhan dalam tataran masyarakat internasional. Tujuan dari menjadikan Islam sebagai pegangan adalah untuk mendukung posisi Iran dalam mencapai keberhasilan segala aktifitasnya dalam dunia internasional. Strategi politik luar negeri Iran yang lain adalah *Ummu Al-Qura* .

Prinsip *Umul Qura* adalah refleksi dari ambisi Iran untuk menghegemoni di Dunia Islam. Dengan mencita-citakan Iran akan menjadi pemimpin dan pusat kekuasaan Umat Islam. Yang dimaksud *Ummul Qura* adalah Iran yang memimpin Dunia Islam, dan hal ini bisa dilihat dari prinsip dan tujuan dari politik luar negeri Iran, yaitu ekspansi nilai-nilai dan ajaran Revolusi Islam. Dalam hal ini konsep *wilayatul faqih* (ajaran Syiah) yang berarti kekuasaan tertinggi dalam struktur politik Republik Islam Iran yang berada di tangan Imam. Ekspansi tersebut diantaranya dengan *Tasdir As-Tsaurah* atau ekspansi Revolusi Iran keluar negara Iran, yaitu Dunia Islam, seperti kerjasama pendidikan dengan negara-negara Islam. Dan tujuan penting dari politik luar negeri Iran adalah *ta'min lil Ihtiyajat ad-dakhili lil Ummul al-Qura* atau menjaga kebutuhan internal *Ummul Al-Quro* yang tak lain adalah Iran (Sahal,2006:3).

Revolusi Islam Iran dianggap sebagai pemberontakan melawan dominasi sistem dunia internasional yang "tidak adil". Republik Islam dibangun atas asumsi bahwa sistem dunia bipolar, terbagi antara blok Timur dan Barat tidak memberikan keadilan dan keamanan bagi semua bangsa di dunia, yang hanya bertujuan untuk melayani kepentingan kedua negara adidaya dan negara satelit.

Iran kemudian menjadi anggota aktif Gerakan Non-Blok di bawah Perang Dingin, mengemukakan oposisi yang keras terhadap kepentingan kedua kekuatan dunia yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet di Timur Tengah. Doktrin yang terkenal Ayatollah Khomeini yaitu “tidak Timur tidak Barat” menjadi pedoman utama dari kebijakan luar negeri Iran setelah revolusi.

Dibawah doktrin umum ini, prioritas Iran adalah untuk mempertahankan "persatuan" antara bangsa-bangsa Muslim di dunia, dan diantara semua orang “tertindas”, terhadap penindasan sistem dunia yang ada. Untuk beberapa waktu, kebijakan ini disebut "mengekspor revolusi" ke luar negeri. Namun, terminologi ini, serta isi pesan Iran, tidak diterima oleh sebagian besar pemerintah Arab konservatif, yang mencoba untuk menjaga hubungan baik dengan salah satu dari dua negara adidaya saat itu yakni AS dan Soviet. Sejak runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin, kebijakan luar negeri Iran tidak berubah dalam strategi. Tujuan utamanya adalah untuk melawan dominasi Amerika Serikat dan sistem unilateralisme dalam politik dunia, melalui membuat aliansi dengan negara-negara berkembang. Meskipun istilah "mengekspor revolusi" secara resmi ditinggalkan, Iran telah berhasil memperluas pengaruhnya atas wilayah di luar wilayah sendiri dan bahkan di luar dunia Muslim, terutama di Amerika Latin dan Afrika, Prioritas kebijakan luar negeri Iran diantaranya :

1. Menjaga hubungan baik dengan negara regional dan dunia kecuali Israel.

2. Membuat aliansi antara negara-negara berkembang dari Asia hingga Amerika Latin.
3. Memimpin oposisi terhadap dominasi Barat dan unilateralisme atas politik dan ekonomi dunia serta sostem ekonomi dunia (http://www.foreignaffairs.com/articles/141209/mohammad-javad-zarif/what-iran-really-wants diakses pada 28 Desember 2014)

3.2.1.5 Kebijakan Luar Negeri Iran

Idiologi Syiah yang diusung Ayatollah khomeini berpengaruh dalam setiap formulasi kebijakan luar negeri Iran. Kemudian bagaimana peran-peran elit lainnya selain Rahbar (Pemimpin Agung), seperti Presiden dan Dewan-Dewan di bawahnya. Dan juga apa saja tindakan yang akan dilakukan oleh para pembuat kebijakan tersebut untuk mengantisipasi kegagalan dari kebijakan yang sudah dibuat. Kebijakan luar negeri iran dapat dilihat dari cara Iran berperilaku di tengah isu pengembangan nuklir Iran.

Pada tahun 2006, presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad pernah mengirimkan surat untuk presiden Amerika Serikat, George W. Bush. Surat tersebut secara tidak langsung telah mengkonstruksikan *operational code-nya* Iran tentang Amerika Serikat, yaitu, ekspektasi Iran tentang kemungkinan kebijakan dan strategi Amerika Serikat selanjutnya. Perilaku Ahmadinejad, terbentuk dari apa yang terjadi di dalam perpolitikan domestik di Iran, identitas suatu kelompok besar, dalam hal ini identitas masyarakat Iran yang menjunjung tinggi

nasionalisme dan kebanggaan mereka sebagai bangsa Persia, serta kekhawatiran akan kelangsungan hidup politiknya. Pada masa kekuasaan Reza Shah, Amerika Serikat menjadi aliasi dari Iran karena beberapa alasan, salah satunya adalah membendung ideologi komunis masuk ke Timur Tengah. Pada masa sekarang, Iran menjadi anti-Amerika Serikat (Hirsch,2003:6-7).

Pada masa Ahmadinejad dalam pengembangan nuklirnya Iran terkesan lebih keras menanggapi protest dari dunia internasional yang menginginkan denuklirisasi Iran. Pada akhir tahun 2011, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz. Selat Hormuz adalah selat yang menghubungkan negara-negara penghasil minyak di Teluk seperti Bahrain, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dengan Samudera Hindia. Sekitar 40% kapal tanker minyak dunia melewati selat tersebut. Iran melakukan hal tersebut sebagai ancaman jika Barat tetap memberikan sanksi pada Iran terkait pengembangan nuklirnya.

Di samping itu, negara-negara besar juga menginisiasikan adanya perundingan damai dengan Iran agar Iran mau menutup fasilitas pengayaan uraniumnya. Di satu sisi, sebenarnya hal inilah yang meningkatkan kepercayaan diri Iran untuk terus melanjutkan pengembangan nuklirnya. Karena secara psikologis, Iran merasa kalau negaranya sudah mulai ditakuti oleh dunia internasional. Dari sini, kita bisa melihat bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Iran dalam mencapai tujuannya. Pemimpin Agung Iran saat ini Ayatollah Ali Khameini, cenderung melanjutkan kebijakan yang dicetuskan oleh Ayatollah Khomeini yang memiliki

kekuasaan otoritatif sebagai penentu kebijakan agama, politik, dan kebijakan luar negeri Iran (Kuncahyono,2005:9).

Iran merupakan sebuah negara yang cukup menonjol di kancah internaional. Di mana pada tahun 1970 an, Iran dianggap sebagai aktor penting di kawasan Teluk. Aspek geografi memiliki pengaruh yang cukup penting dalam kebijakan luar negeri Iran. Di mana dengan pengaruh geografi tersebut, Iran menjadi lebih terekspos sebagai *great power rivalries* di kawasan Teluk. Di samping itu, Iran berhasil menarik simpati masyarakat dunia pasca lengsernya rejim Syah Pahlevi oleh koalisi Islam dan pasukan radikal. James Piscatori mencatat bahwa Iran berkembang sangat dramatis pada beberapa tahun terakhir, di mana Iran dikenal sebagai negara yang sangat independen, berani menentang negara super power seperti AS, proaktif agama, dan non-blok. Pada perkembangan berikutnya, Iran mengutamakan pengaruh geopolitik, geostrategis, dan globalisasi dalam hubungan internasional (Abud,2015:6).

Jika dilihat dari sudut pandang geopolitik, terdapat pengaruh barat yang cukup kuat pada masa sebelum lengsernya Shah Pahlevi. Di mana ladang minyak dan emas hitam Iran menjadi daya tarik kepentingan ekonomi yang paling krusial. Sehingga, AS memberikan dukungan penuh tehadap pemerintahan Syah Pahlevi pada waktu itu. Namun, Pahlevi berhasil digulingkan melalui *Islamic Revolution* 1979 oleh Ayatulloh Khomeini dan kemudian membentuk Republik Islam Iran. Sejak saat itu, Iran terus berupaya untuk menjadi kekuatan militer utama di kasawan Teluk. Sejak terjadinya revolusi Iran, power yang dimiliki oleh

Iran dikerahkan untuk kepentingan otonomi negara dan tidak lagi berpihak ke Barat meskipun pada saat ini Iran belum mampu melepaskan diri dari perekonomian kapitalis. Dengan hanya bergantung pada SDA di saat hubungan Iran semakin rumit dengan negara barat yang sebelumnya menjadi partner dan konsumen SDAnya membuat perekonomian Iran mengalami stagnasi. Perbaikan struktur perekonomian pun kemudian dilakukan pada masa Rafsanjani dengan meregulasi ulang strategi reformasi ekonomi yang dirancang seperti *International Moneter Fund (*IMF) (Meisarah,2003:6).

Iran juga menilai negaranya sebagai *Islamic Actor* yang berperan penting di Timur Tengah. Sejak 1979, Iran menambahkan aspek agama dalam kredibilitas powernya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penentangan status quo dan integrasi politik kawasan oleh Iran yang didominasi Syiah sehingga menimbulkan kedekatan tradisional dengan Irak. Penentangan tersebut ditujukan kepada Arab Saudi yang didominasi oleh Sunni. Aspek lainnya yang juga sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri Iran adalah perang Iran-Irak. Pada masa perang melawan Irak, posisi Iran juga bertentangan dengan sejumlah negara Arab dan lebih terisolasi. Selain itu, pembentukan Hizbullah dan strategi Iran juga ditujukan untuk pergerakan Syiah. Aspek lainnya dari strategi Teheran ini difokuskan pada konflik Arab Israel. Hubungan Iran dengan negara-negara Arab sempat mencair ketika Iran memilih mengambil posisi netral pada saat invasi Irak ke Kuwait. Dalam konflik Arab-Israel, Iran tidak mengambil kebijakan yang

menguntungkan Israel. Pada masa Khatami, Iran memiliki jaringan yang luas dengan negara-negara di dunia (Mikati,2008:8).

Kebijakan luar negeri Iran mengundang perdebatan dari berbagai analis. Terkait dengan kebijakan pada masa Rafsanjani dan Khatami yang lebih memilih memasukkan aspek ideologi dalam kebijakan luar negerinya Iran tidak jauh berbeda dengan konsep radikal. Pada masa Khatami, kebijakan lebih difokuskan pada pertumbuhan ekonomi dan reformasi politik sedangkan pada masa Ahmadinejad kebijakan bersifat konservatif terutama dalam hal politik dan pengembangan nuklir

3.2.1.6 Hubungan Luar Negeri Iran Irak

Hubungan luar negeri Iran terhadap Irak mengalami perkembangan dari masa ke masa. Iran yang Persia beridiologi Syiah memiliki kedekatan secara historis dengan Irak yang merupakan negara Arab Syiah terbesar. Iran mengalami modernisasi dalam bidang ekonomi dan politik secara besar-besaran pada masa Syah Reza Pahlevi yang disebut dengan "Revolusi Putih". Pada masa ini Iran merupakan sekutu utama Amerika di Timur Tengah. Iran yang sekutu utama AS di Timur Tengah praktis menjadikan Iran sebagai kekuatan politik dan militer berpengaruh di Timur Tengah. Pada masa Shah Pahlevi Iran dipercaya sebagai penjaga keamanan di selat Hormuz. Hubungan Iran dan Irak dimasa Pahlevi cenderung stabil karena saat Iran merupakan kekuatan besar sekaligus sekutu Amerika di Timur Tengah (Alisson,2001:2)

Pasca tumbangnya rezim Shah Reza Pahlevi oleh kaum mullah Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini Iran mengorientasikan kebijakan luar negerinya pada penyebaran nilai-nilai revolusi Islam ke negara-negara Arab dan Islam agar kaum Muslimin bangkit melawan para penguasa yang represif (dan sekuler). Cita-cita ini terbukti dengan lahirnya gerakan-gerakan perlawanan di berbagai wilayah konflik di Timur Tengah seperti Lebanon, Palestina dan Irak, tidak lama setelah gelombang revolusi menyapu Iran. Gerakan revolusi islam Iran menimbulkan kekhawatiran bagi Saddam Husein yang memimpin di negara Irak yang mayoritas Syiah. Konflik dua Negara juga dikarenakan dulu terjadi perang antara Babilonia dengan Persia. Irak adalah penerus Babilonia sedangkan Iran penerus Persia. Dalam sejarah kedua bekas kerajaan telah berperang dan saling menaklukan. Kedua Negara tersebut telah berkonflik sejak dulu, yakni dimulai pada masa kerajaan Mesopotamia hingga kekaisaran Ottoman (antara tahun 1555 dan 1918) mengenai batas wilayah antar Irak dan Iran. Perang ini juga perang sentimen antara Arab yang Sunni dan Persia yang Syiah yang bertujuan merebut wilayah khuzestan Iran yang kaya minyak. Perang ini berlangsung selama 8 tahun dan berakhir dengan gencatan senjata.

Pasca berakhirnya perang dengan gencatan senjata Iran dan Irak tidak menjalin hubungan diplomatik. Hal ini semakin memanas dengan dukungan Saddam Hussein atas kelompok *Mujahidin khalq* (MKO) kelompok mujahidin Sunni yang memberontak pada rezim Syiah di Iran pimpinan Ayatullah khomeini yang kerap melakukan aksi terorisme di Iran dan memberikan perlindungan

kelompok ini di kamp Al-Ashraf Irak. Iran juga dipercaya mendukung gerakan pemberontakan oleh milisi-milisi Syiah di Irak dan kerap memberikan suaka pada pemimpin politik Syiah Irak salah satunya Perdana Menteri Irak saat ini Nouri al-Maliki dan elit syiah (http://www.foreignaffairs.com/articles/141209/mohammad-javad-zarif/what-iran-really-wants diakses pada 24 Desember 2014

Hubungan Iran Irak membaik pasca lengsernya Rezim Saddam Hussein oleh invasi Amerika pada tahun 2003. Hal itu memberikan peluang masuknya pengaruh Iran di Irak hal ini ditandai dengan banyaknya poster bergambar pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali khamenei di jalanan Irak dan pembukaan kedutaan besar di kedua negara. Naiknya Maliki yang pro Iran menjadi simbol membaiknya hubungan Iran Irak yang tidak terjadi dimasa sebelumnya. Bagi Iran, pemerintahan Maliki terbukti sebagai rekan yang taat dan simbol kebangkitan kekuatan Syiah di seluruh Timur Tengah. Apalagi, Irak selama puluhan tahun dikuasai pemimpin Sunni, Saddam Hussein.

Menurut pejabat departemen luar negeri Amerika Brizinski ,Teheran tak akan menerima pemimpin non-Syiah di Baghdad yang tidak simpatik terhadap ambisi Iran. Dalam analisasnya mengevaluasi capaian militer Amerika Serikat dalam pendudukannya selama sembilan tahun di Irak. Koran di Amerika Serikat itu mengakui bahwa Iran menjadi pemenang perang di Irak. Kedua pemimpin negara juga kerap rutin bertemu untuk meningkatkan hubungan bilateral. Irak juga menjamin Iran bahwa negara manapun tidak akan dapat memakai wilayah Irak untuk menyerang Iran. Dalam periodenya sebagai Perdana Menteri Irak, Maliki

mengontrol kementerian strategis, seperti kementerian pertahanan, kementerian dalam negeri, dan lembaga keamanan nasional. Iran selama ini juga mendorong Maliki mendukung rezim Presiden Bashar al-Assad di Suriah yang berasal dari kaum minoritas Syiah Alawit. Pada masa Maliki kamp pemberontak Iran yang bermarkas di Irak di tutup yang sebelumnya dilindungi oleh rezim Saddam Hussein.

Dalam bidang ekonomi Iran Irak juga mengalami peningkatan ditandai dengan transaksi perdagangan yang mencapai 20 milyar dolar AS. Iran juga kerap investasi di Irak dalam bidang infrastruktur, pembangunan kilang minyak, listrik, jalan maupun pembangunan bendungan di Irak. Dalam bidang pariwisata jutaan rakyat Iran kerap berziarah ke Irak tempat dimana kota suci umat Islam Syiah berada yaitu Najaf, Karbala, dan Samarra yang menambah pemasukan devisa bagi Irak (Ricks,2006:8).

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini akan dirancang ke arah yang lebih deskriptif atau kualitatif, merujuk pada salah satu jenis penelitian yang bertujuan menyajikan gambaran lengkap Kebijakan luar negeri Irak pada pemerintahan Nouri al-Maliki. Dan penelitian deskriptif semakin diarahkan dalam memberikan keterkaitan antar variabel, menguji hitpotesis, mengembangkan generalisasi dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian tentunya dibutuhkan data-data spesifik guna memperlancar peneliian tersebut.dengan melakukan pengumpulan data,maka penelitian dapat berjalan karena penelitian kualitatif, sumber utama pelaksanaan penelitian yaitu data-data yang sudah ada dikumpulkan dan disusun sehinggga memberikan gambaran untuk melakukan penelitian selanjutnya.

Dalam penelitian ini, peneliti baru menggunakan studi pustaka dalam mengumpulkan data dengan mencari informasi memalui jurnal, tulisan serta skripsi yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri Irak. Dari hasil studi pustaka, peneliti merasa data yang ditemukan sudah cuukup untuk melakukan beberapa wawancara guna mendapatkan data yang spesifik untuk menyelesaikan penelitian ini.Wawancara sebagai studi lapangan akan dilakukan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang didapat akan lebih akurat.

3.2.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang dilakukan peneliti berupa *purposive.* Yaitu dengan cara menentukan pihak-pihak yang terkait tentang tujuan, masalah dan variabel dari penelitian yang sedang dikaji dalam hal ini narasumber Pengamat Politik Timur Tengah, staff Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Metode yang dipergunakan akan semakin difokuskan lewat metode wawancara sesuai dengan masalah yang akan dikaji secara mendalam. Maka,

berkaitan dengan penelitian tentang *kebijakan luar negeri Irak terhadap Iran pada masa Perdana Menteri Nouri Al-Maliki (2006-2014),* maka peneliti akan bertemu dengan beberapa staf LIPI dalam menggali informasi dan menambah sumbangsih yang maksimal terhadap penelitian yang tengah dikaji.

3.2.4 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif berikut, peneliti akan menganalisis data-data yang diperoleh lewat studi pustaka, penelurusan online dan wawancara yang nantinya akan dipergunakan dalam menunjang keperluan penelitian itu sendiri. Hal ini sengaja dilakukan guna menemukan titik kolerasi antara data-data yang dikumpulkan dengan perumusan masalah yang telah dibuat. Data-data yang bersumber dari wawancara, penganalisaan dan wawancara akan dikemas sedemikian rupa hingga menjadi data yang berfungsi secara akademis nantinya dan dipersembahkan di dalam penelitian berikut. Selanjutnya, penarikan kesimpulan akan dilakukan lewat beberapa data primer maupun skunder yang diperoleh lewat informan LIPI beberapa pakar pengamat Hubungan Internasional yang akan semakin memberikan sumbangsih yang besar dalam kajian pengamatan Kebijakan luar negeri Perdana Menteri Nouri Al-Maliki terhadap Iran.

3.2.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian berikut, maka penulis memperoleh data dan informasi yang bersumber dari berbagai lokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan terkait masalah yang tengah dikaji :

1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jalan jendral Gatot Subroto 10 Jakarta Pusat.
2. Kedutaan Besar Republik Irak, Jalan Teuku Umar, No. 38 Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat.
3. Kedutaan Besar Republik Islam Iran, Jalan Hos. Cokroaminoto, No.110 Menteng, Jakarta Pusat.

3.2.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai bulan Februari 2014 dan direncanakan selesai bulan Maret 2015 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1

Waktu Penelitian

Kegiatan		Waktu Penelitian														
		2014												2015		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1.	Pengajuan Judul															
2.	Usulan Penelitian															
3.	Seminar Usulan Peneltian															
4.	Bimbingan															
5.	Pengumpulan & Pengolahan Data															
6.	Sidang Skripsi															